

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Memiliki kekayaan gas alam, minyak bumi, hutan tropis, mineral, serta sumber daya laut melimpah menjadi pilar utama perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dengan potensi yang ada, suatu negara akan mengalami kemajuan nasional jika mampu merealisasikan strategi pengembangan sumber daya alam dengan optimal.

Potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan dengan baik apabila sumber daya alam tidak diintegrasikan dengan perbaikan kualitas SDM sebagai elemen proses transformasi tersebut. Tantangan yang dimiliki Indonesia ialah ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah yang sering merugikan nilai tambah dan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional. Sedangkan negara maju lainnya menunjukkan keberhasilan kemajuan ekonomi berasal dari sinergi antara SDA dan SDM yang terampil. Sinergi tersebut dapat berasal dari investasi melalui bidang pendidikan, teknologi, dan inovasi.

Keterikatan SDA dan SDM menjadi hubungan yang krusial. Sumber daya alam melimpah mampu menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Sebaliknya SDM unggul dibutuhkan dalam mengoptimalkan pemanfaatan SDA secara efisien guna menghindari kutukan sumber daya (*Resource curse*) yang sering terjadi di negara berkembang. *Resource curse* ialah fenomena suatu wilayah tidak dapat

menciptakan pertumbuhan ekonomi relatif cepat dengan memiliki kekayaan SDA yang dimiliki. Bisa pula disimpulkan mengalami pembangunan yang relatif lamban dibanding wilayah lain yang memiliki kekayaan alam lebih rendah atau bisa disebut sebagai kegagalan memanfaatkan kekayaan alam sebagai pendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Penyebab kutukan sumber daya ditimbulkan oleh terjadinya pengelolaan sumber daya yang buruk, ketergantungan berlebih pada sumber daya alam, korupsi, manajemen yang tidak efektif.

Pembangunan ekonomi didefinisikan menjadi langkah pendorong kenaikan pada pendapatan total dan pendapatan perkapita riil masyarakat pada rentang waktu berkelanjutan, serta mempertimbangkan adanya peningkatan jumlah penduduk, pemerataan pendapatan bagi masyarakat serta transformasi mendasar di struktur ekonomi di suatu negara (Fitri et al., 2022, p. 86).

Secara konvensional pembangunan hanya dianggap sebagai peristiwa ekonomi. Pada faktanya pembangunan adalah 2 proses kompleks mengaitkan transformasi besar terkait struktur sosial, tindakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, selain itu juga mengupayakan peningkatan laju dari pertumbuhan ekonomi, penyusutan kesenjangan dan mengatasi kemiskinan absolut (Todaro & Smith, 2012, p. 16).

Aspek utama yang menjadi konsentrasi pembangunan ekonomi yaitu: (1) penanganan kemiskinan, (2) pertumbuhan, (3) transformasi ekonomi, dan (4) memastikan kelangsungan pembangunan yang mengubah pengelompokan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris beralih menjadi masyarakat industri. Melalui aspek ini, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan

ekonomi yang selanjutnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberlanjutan pembangunan ekonomi didukung oleh pergeseran struktur ekonomi yang dimana merupakan indikator penting dalam peningkatan pertumbuhan dan mengatasi masalah kemiskinan.

Produk Domestik Bruto (PDRB) menjadi indikator yang dimanfaatkan sebagai alat ukur dari pembangunan ekonomi karena mampu menggambarkan segala aspek aktivitas masyarakat dan kinerja perekonomian secara umum dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Daya saing sektor ekonomi di suatu wilayah Berperan sebagai penentu utama dalam mempercepat upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Sektor unggulan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja (Imam Wahyudi, Junaidin Zakaria, 2022).

Kontribusi sektor industri dalam kontribusi output dan kontribusi pemanfaatan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi menjadi penggambaran nyata terkait kinerja perekonomian. Pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara akan mengalami peningkatan pesat ditunjukkan melalui peningkatan kontribusi pada sektor industri. Ada pula indikator lain yang sering digunakan seperti tingkat pertumbuhan, pendapatan per kapita dan juga pergeseraan struktur ekonomi.

**Gambar 1. 1 Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Malang menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten Malang

Dilihat pada gambar 1.1 nilai total PDRB ADHK di Kabupaten Malang pada rentang waktu 2021-2024 mengalami pertumbuhan. Tahun 2021 menunjukkan nilai total PDRB ADHK sebesar Rp 68.619,10 miliar rupiah, tahun 2022 menunjukkan nilai total Rp 72.136,46 miliar rupiah, pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada angka Rp 75.744,29 miliar rupiah dan tahun 2024 mencapai angka Rp 79.500,89 miliar rupiah. Nilai total PDRB ADHK mengalami pertumbuhan yang stabil pada tahun 2021 hingga 2024. Dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang maka perlu diketahui sektor unggulan yang memiliki potensi lebih dikembangkan sehingga pembangunan daerah akan mampu dilaksanakan dengan baik.

Perkembangan perekonomian di suatu wilayah dipengaruhi oleh keberadaan sektor unggulan yang memiliki peranan besar. Peran besar ini dikarenakan sektor unggulan menjadi mesin penggerak yang memfasilitasi kemajuan bagi sektor lainnya sehingga menjadikannya sebagai sektor penting bagi pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dalam upaya pembangunan ekonomi

maka perlu melakukan identifikasi terkait sektor unggulan yang dimiliki. Dengan analisis tersebut maka pengembangan sektor unggulan ke arah lebih optimal merupakan keharusan. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi regional, sekaligus memastikan peningkatan pendapatan daerah dapat dicapai secara maksimal (Muhammad Sayuti, 2020).

Secara Global hampir semua negara yang mengalami pembangunan ekonomi juga disertai terjadinya pergeseran struktur perekonomian, dimana struktur ekonomi menjadi suatu sistem perekonomian yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat yang mampu menggambarkan situasi perekonomian masyarakat dari segi jumlah barang atau jasa hasil proses produksi. Struktur ekonomi untuk menggambarkan komposisi semua sektor ekonomi dalam suatu perekonomian dan menjadi pengaplikasian sistem ekonomi dengan tujuan kondisi sosial ekonomi negara yang baik atau kesejahteraan negara. Struktur ekonomi akan berubah mengikuti situasi dan kondisi iklim ekonomi suatu negara sehingga saat pemerintah melakukan perubahan kebijakan maka dapat tergambar dalam struktur ekonomi yang dihasilkan.

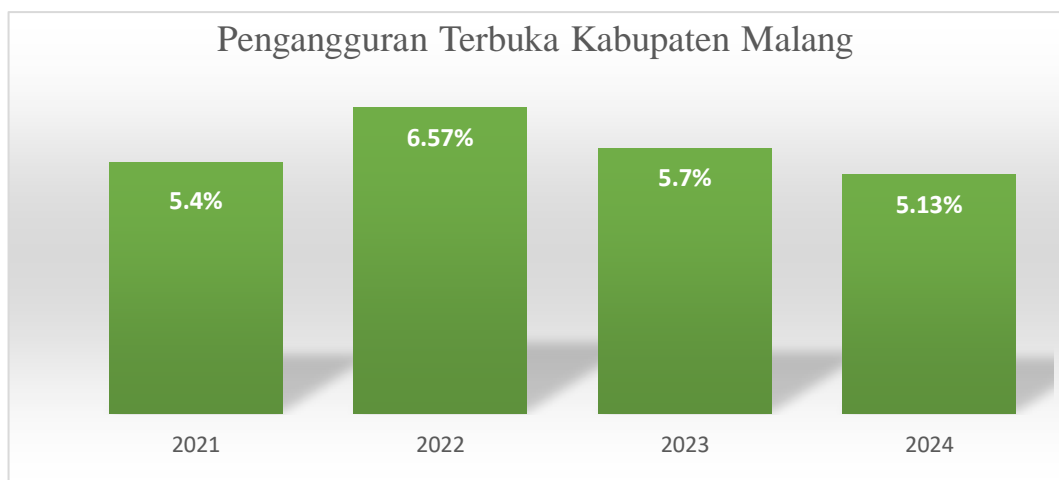
Perubahan struktur ekonomi berfokus pada penyesuaian komposisi barang dan jasa yang dihasilkan secara nasional. Hal ini juga meliputi evaluasi peluang kerja, serta penanggulangan jurang ketimpangan di berbagai dimensi sektoral, kewilayahan, dan kelompok sosial. Peningkatan pendapatan mampu mendorong terjadinya perubahan komposisi produk nasional yaitu terjadinya pergeseran yang terjadi pada sumbangan sektor primer bergerak meningkat ke arah sektor sekunder dan tersier.

Struktur ekonomi daerah mampu mempengaruhi peningkatan sektoral ekonomi yang saling berkaitan. Kemajuan suatu wilayah ditandai dengan adanya kualitas SDM memadai, ketersediaan SDA melimpah dimanfaatkan dengan maksimal didukung kapasitas tenaga kerja sehingga dapat tercapainya pembangunan wilayah. Pada negara berkembang, pembangunan ekonomi menjadi upaya dalam mengatasi masalah pengangguran serta kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu peningkatan pendapatan perkapita bukan menjadi satu-satunya fokus pembangunan ekonomi tetapi harus jalan beriringan dengan perbaikan struktur sosial dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional dapat diwujudkan dengan cara proses industrialisasi yang diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki sektor yang mampu ditingkatkan oleh pemerintahan daerah sehingga dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang dan memiliki permasalahan terkait tenaga kerja. Dalam setiap tahun Indonesia selalu mengalami peningkatan perekonomian dan disertai bertambahnya penduduk dengan sedikitnya perluasan lapangan kerja. Sehingga Indonesia merancang suatu kebijakan yang memberi kebebasan pemerintah daerah untuk merancang dan mengelolah kepentingan daerahnya dinamakan dengan kebijakan otonomi daerah. Keberadaan otonomi daerah diharapkan agar masing-masing daerah mampu menjalankan kebijakannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut tanpa menunggu bantuan langsung pemerintah pusat. Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah ialah kewajiban dalam menentukan dan memahami kondisi daerah dan potensi yang dapat ditingkatkan pada daerah yang

menjadi tanggung jawabnya. Keberlangsungan perekonomian daerah dapat mengalami perbaikan jika suatu daerah telah mampu menentukan dengan benar potensi yang dimilikinya (Kesuma & Utama, 2015). Sehingga dengan terwujudnya pembangunan daerah maka akan mempengaruhi peningkatan sektoral perekonomian yang akan berdampak pada perluasan lapangan kerja baru dan memiliki kapabilitas untuk merekrut jumlah pekerja dengan kuantitas tinggi.

**Gambar 1. 2 Grafik Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang**



Sumber : BPS Kabupaten Malang

Pada gambar 1.2 menunjukkan keberadaan masalah terkait pengangguran di Kabupaten Malang. Dilihat dari data pengangguran terbuka dimana pada tahun 2021-2024 Kabupaten Malang memiliki jumlah pengangguran terbuka fluktuasi, kondisi ini secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk perubahan pada sektor industri. Perubahan ini menjadi faktor dikarenakan perubahannya bukan hanya terjadi dengan munculnya industri baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga terdapat transformasi industri lama sehingga kondisi tersebut mampu menghilangkan lapangan kerja yang sudah ada. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malang pada tahun 2024 sebesar

5,13% dimana nilai tersebut menjadikan Kabupaten Malang menempati posisi 5 sebagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur yang memiliki jumlah pengangguran terbuka tertinggi setelah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang dan Kabupaten Bangkalan.

Identifikasi sektor unggulan atau *leading sector* merupakan langkah vital yang memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonominya secara strategis. Sektor unggulan merujuk pada bidang ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, seperti produktivitas tinggi, kontribusi signifikan terhadap PDRB, dan kemampuan dalam merangsang pertumbuhan berkelanjutan. Pengidentifikasian sektor unggulan menjadi langkah dalam pertimbangan regulasi yang direncanakan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian regional. Pemerintah membutuhkan klasifikasi sektor unggulan agar pemerintah dapat menentukan regulasi yang akan dijalankan harus menuju ke arah mana sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tertuju pada sektor yang mampu secara signifikan dan cepat dalam penyelesaian masalah yang muncul. Hal ini membantu pemerintah dalam penggunaan alokasi sumber daya yang tidak efisien pada sektor yang bukan merupakan sektor unggulan. Di sisi lain sektor unggulan membantu pemerintah memfokuskan pengembangan kearah yang seharusnya sehingga mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sektor unggulan diketahui mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional hingga global. Daerah yang mampu memetakan sektor unggulannya akan lebih mudah dalam menggait investasi domestik hingga asing. Studi mengenai sektor unggulan tidak hanya fokus dalam membantu perencanaan regulasi



pemerintah, tetapi juga menjadi fondasi bagi penelitian yang bertujuan menganalisis dinamika ekonomi lokal. Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti mengambil judul “Analisis Struktur Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pendekatan *Location Quotient*, *Shift Share* dan *Overlay* di Kabupaten Malang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui penguraian latar belakang mampu menimbulkan rumusan masalah yang berkaitan dengan studi ini, antara lain :

1. Apakah ada sektor basis atas dasar data PDRB di Kabupaten Malang?
2. Sektor mana saja yang termasuk sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Malang?
3. Apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Malang?
4. Apakah terdapat sektor unggulan atas dasar PDRB di Kabupaten Malang?
5. Apakah ada pengaruh sektor unggulan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Menelaah pergeseran struktur ekonomi dan penyerapan ketenagakerjaan menjadi tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Shift Share* di Kabupaten Malang tahun 2021- 2024. Tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui adakah sektor basis di Kabupaten Malang atas dasar data PDRB.
2. Untuk mengetahui sektor mana saja yang termasuk sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh sektor unggulan atas dasar PDRB di Kabupaten Malang
5. Untuk mengetahui adakah hubungan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Studi dilakukan dengan adanya batasan penelitian sebagai upaya dalam pembahasan hasil temuan penelitian yang terfokus tanpa adanya pembahasan yang meluas dari pengkajian. Sebab itu, peneliti memusatkan perhatian untuk memperjelas arah penelitian mencakup sektor basis, sektor unggulan penyerapan tenaga kerja dan pergeseran struktur ekonomi.

Tujuan penelitian agar kita mampu mengetahui sektor unggulan dan mampu menyerap SDM lebih banyak yang kemudian dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mengalami kenaikan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Pada kajian studi ini manfaat yang didapat, antaranya :

1. Secara Teoritis :

Mampu memperluas cakupan pemahaman dan perspektif pada ilmu ekonomi mengenai isu pembangunan wilayah. Dan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah agar menjadi pertimbangan dalam penyelesaian suatu permasalahan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

## 2. Secara Praktisi

- a. Bagi Akademik, diharapkan hasil dari kajian studi dapat menjadi sumber informasi dan sumbangsih terkait pembangunan daerah yang kemudian dapat memberi implikasi positif bagi pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Bagi studi di masa mendatang, diharapkan mampu menjadi rujukan studi dan kerangka konseptual guna memperkuat pengembangan kajian terbaru dalam penelitian dengan pembahasan yang sama.